

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, minat masyarakat Jepang terkait isu di Timur Tengah mulai mencuat setelah terjadinya Krisis Teluk. Sebelum itu, hubungan Jepang dan Palestina mulai terlihat ketika Jepang dilanda *oil shock* pada tahun 1973. Dengan adanya *oil shock* Jepang yang sebelumnya menjalankan kebijakan luar negerinya berdasarkan *seikei bunri* yang artinya memisahkan isu ekonomi dan isu politik, menyadari bahwa suatu masalah politik akan berujung kepada masalah ekonomi dan sebaliknya (Neser & Ampiah, 1989). Oleh karena itu, untuk mengamankan pasokan minyak dari negara- negara Arab, Jepang mengambil langkah untuk berada di pihak Arab dan mulai memberikan bantuan kepada Palestian sebagai langkah strategisnya (Naramoto, 1991).

Lalu pasca Krisis Teluk, sejumlah demonstrasi dan petisi dilakukan oleh masyarakat Jepang dalam menyuarakan anti perang. Bahkan pada tanggal 7 Februari 1990 terjadi demonstrasi terbesar yang menyuarakan anti perang dengan massa sekitar

10.000 orang di Tokyo yang diadakan oleh Partai Sosialis Jepang. Minat dan ketertarikan masyarakat Jepang terhadap latar belakang Timur Tengah, termasuk asal muasal Palestina semakin meningkat meskipun pada kenyataannya pemerintah Jepang jarang menyebutkan masalah Timur Tengah setelah terjadinya krisis. Sejak terjadinya perang di Timur Tengah, penjualan buku terkait Timur Tengah di Jepang meningkat hingga sepuluh kali lipat. Bahkan diskusi publik mengenai peradaban Islam dan Islam pada 11 dan 12 Februari 1991 dihadiri oleh sekitar 600 partisipan yang di tahun sebelumnya hanya dihadiri sekitar 100 partisipan. Oleh karena itu, Krisis Teluk dan perang mendorong masyarakat Jepang untuk lebih memahami mengenai Timur Tengah, termasuk masalah Palestina. (Naramoto, 1991).

Dalam konteks memberikan bantuan dukungan ke Palestina, Jepang

telah aktif mulai memberikan diplomasi dukungan pada tahun 1974 kepada PBB untuk dukungan kemanusiaan pengungsi Palestina melalui UNRWA. Bahkan di tahun 1990-an, Jepang merupakan sumber donor kedua terbesar untuk Palestina dan setelah dua dekade kemudian tepatnya pada tahun 2020-2021, Jepang masih menempati peringkat kelimasebagai sumber donor ke Palestina dan pada Juni 2023 total bantuan Jepang untuk Palestina mencapai sebesar 2.3 miliar USD (Toshiya, 2024). Di tahun 2003, pemerintah Jepang mengumumkan program bantuan ke Palestina yaitu “Road Map for Japanese Assistance to Palestinians”. Lalu sejak tahun 1993 hingga 2004 Jepang juga telah memberikan bantuan ke Palestina melalui kebijakan ODA-nya sebesar 760 juta USD (Miyagi, 2011). Bukan hanya bantuan finansial, sejak tahun 1997 hingga 2022 Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency) juga menyelenggarakan program pelatihan teknis, yaitu “Knowledge Co-Creation Program (KCCP)” untuk 6.838 warga Palestina (Toshiya, 2024).

Tujuan dari kebijakan luar negeri Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri ke Palestina adalah untuk menstabilkan dan memperbaiki kehidupan masyarakat terutama wanita, anak, dan para pengungsi. Di tahun 2015, pemerintah Jepang telah berkontribusi sebanyak 39.20 juta USD kepada UNRWA. Dengan total kontribusi, sebanyak 19.75 juta USD diberikan untuk program utama dan pelayang agensi serta 14.20 juta USD diberikan untuk mendukung program darurat agensi di Suriah dan wilayah Palestina yang diduduki, dan sisanya sebanyak 5.25 juta USD disalurkan untuk bantuan makanan bagi pengungsi Palestina yang miskin (Bhatt, 2016) . Selain itu, pada tahun 2016 Jepang juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan UNRWA di Agency’s Kalandia yang merupakan pusat pelatihan di Ramallah. Dengan menandatangani perjanjian kerjasama tersebut, Jepang setuju untuk berkontribusi sebesar 38.21 juta USD ke UNRWA untuk pengungsi Palestina (UNRWA, 2016).

Upaya lain yang Jepang lakukan dalam rangka memberikan bantuan luar negeri ke Palestina adalah dengan memberikan penguatan kapasitas

administrasi pemerintahan. Dalam hal ini Jepang mendukung Palestina untuk mengembangkan kondisi fiskalnya dan juga membantu Palestina pada sektor pelayanan publik. Palestina yang mengalami kondisi fiskal yang buruk membuat Jepang sejak tahun 2007 telah memberikan bantuan dalam bentuk non-proyek pada setiap tahunnya dengan kisaran 1,1 miliar yen hingga 1,5 miliar yen. Lalu pada tahun 2010, Jepang memperbesar bantuan luar negerinya untuk Palestina sebesar 1,5 miliar yen. Selanjutnya pada tahun 2013, Jepang memberikan bantuan sebesar 800 juta yen melalui pertemuan Menteri Luar Negeri Jepang Fumio Kishida dan Menteri Keuangan Palestina Shukri Bishara yang digunakan oleh Palestina untuk pembangunan ekonomi dan sosial. (Kementerian Luar Negeri Jepang, 2013).

Selanjutnya pada tahun 2014 dan 2015, Jepang memberikan bantuan luar negeri ke Palestina melalui sejumlah organisasi internasional. Pada tahun 2014, melalui UNRWA dan UNICEF, Jepang mengalokasikan dana sebesar 5.5 juta USD, lalu melalui NGO Jepang mengalokasikan dana sebesar 2.2 juta USD, dan dana sebesar 0.8 juta USD Jepang alokasikan untuk memberikan bantuan luar negeri ke Palestina melalui JICA. Selanjutnya pada tahun 2015, Jepang memberikan bantuan makanan untuk pengungsi Palestina sebesar 6.30 juta yen yang disalurkan melalui UNRWA. Jepang juga memberikan total 90 juta USD bantuan keuangan melalui Bank Dunia untuk pembangunan Palestina.

Selain melakukan upaya pemberian bantuan luar negeri secara langsung yaitu dari pemerintah Jepang dan juga disalurkan melalui sejumlah organisasi internasional serta bekerjasama dengan organisasi diluar kawasan. Jepang juga berupaya dengan membangun inisiasi untuk mempromosikan pembebasan Palestina. Pada bulan Juli 2006, pemerintah Jepang mengusulkan *Corridor for "Peace and Prosperity" Initiative* sebagai inisiatif jangka menengah untuk mewujudkan hidup berdampingan dan makmur antara Palestina dan Israel (Kementerian Luar Negeri Jepang, 2009). Inisiasi ini bertujuan untuk berkontribusi atas terciptanya perekonomian Palestina yang

layak berdasarkan kegiatan sektor swasta melalui pembangunan wilayah agroindustri dari Tepi Barat, antara lain, negara-negara Teluk melalui Yordania. Konsep ini dipromosikan melalui kerjasama regional antara Israel, Palestina, Yordania, dan Jepang dengan memanfaatkan ODA dari Jepang dan sumber lainnya. Selanjutnya upaya ini diwujudkan melalui Jericho Agricultural Industrial Park (JAIP).

Melalui inisiasi ini, sektor swasta Palestina didorong untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Bukan hanya itu, *public private partnership* (PPP) juga memiliki peran krusial dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sejak Juni 2011 dan per Januari 2016 terdapat 33 pihak penyewa yang menandatangani perjanjian untuk beroperasi di kawasan industri ini dan terdapat dua pabrik yang mulai beroperasi pada Februari 2016. JICA memberikan dukungan dengan mengirimkan tenaga ahli, pelatihan, dan dukungan terhadap kegiatan MICE (*meetings, incentives, conferences and exhibitions*) di Palestina. Tujuan jangka panjang dari kebijakan luar negeri Jepang adalah membangun kepercayaan antara Israel dengan negara Arab dan juga mendorong pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kerjasama regional antara Palestina, Israel, dan Yordania akan mengarah kepada kerjasama ekonomi yang akan memenuhi tujuan dari dijalkannya *Corridor for "Peace and Prosperity" Initiative*.

Bantuan-bantuan Jepang untuk Palestina juga disalurkan melalui kerangka kerjasama yang disebut dengan *Conference on Cooperation among East Asian Nation for Palestinian Development* (CEAPAD). CEAPAD merupakan inisiasi multilateral pertama Asia Timur di Timur Tengah yang diinisiasi, dikembangkan, dan dikoordinasi oleh Jepang. Melalui kerangka kerjasama ini, Jepang berupaya untuk menciptakan ajakan kontribusi yang aktif dari negara-negara Asia terhadap perwujudan perdamaian Israel - Palestina dengan memberi dukungan melalui kerangka solusi "*Two-State Solution*".

Selain itu CEAPAD juga ditujukan agar pengembangan Palestina

dapat didukung oleh negara-negara di Asia Timur. Pertemuan pertama CEAPAD diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada tanggal 13-14 Februari 2013. Pertemuan ini dihadiri menteri luar negeri dari sejumlah negara sebagai anggota konferensi, yaitu Korea Selatan, Brunei, Vietnam, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia. Sedangkan Jepang berperan sebagai host dan Palestina merupakan co-host pada pertemuan ini. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga hadir sebagai observer, yaitu Liga Arab, IDB, UNRWA, Bank Dunia, dan PBB (Kementerian Luar Negeri Jepang, 2013).

Berselang satu tahun, CEAPAD II diselenggarakan pada 1-2 Maret 2014 di Indonesia. Seluruh negara pada pertemuan CEAPAD I turut bergabung pada CEAPAD II ini dan terdapat negara-negara yang baru bergabung, yaitu Laos, Kamboja, dan Laos (Kementerian Luar Negeri Jepang, 2014). Selanjutnya, pada 27 Juni 2018 diselenggarakan CEAPAD III di mana Thailand merupakan tuan rumah pada kesempatan ini. Pada pertemuan CEAPAD III ini dihadiri oleh 10 negara, yaitu Jepang, Palestina, Thailand, Indonesia, Singapura, Vietnam, Malaysia, Mesir, dan Korea Selatan. Pertemuan ini juga dihadiri oleh lima organisasi internasional, yaitu UNRWA, IDB (Islamic Development Bank), Bank Dunia, Liga Arab, dan The Office of the Quartet (Kementerian Luar Negeri Jepang, 2018). Selain melakukan pertemuan dalam bentuk konferensi, negara-negara yang bergabung dengan CEAPAD juga melakukan Senior Official Meetings yang telah dilakukan dua kali, yaitu pada tahun 2016 di Jepang dan pada tahun 2019 di Palestina. Bantuan negara-negara dalam CEAPAD difokuskan untuk mengembangkan sumber daya manusia di Palestina sehingga bentuknya merupakan *capacity building*. Di mana bantuan *capacity building* dari negara-negara CEAPAD ditujukan agar ketika kemerdekaan sudah ada di tangan Palestina, keterampilan sumber daya manusia di Palestina dari *capacity building* tersebut dapat digunakan. Dengan demikian, optimalisasi dari hasil *capacity building* tersebut tidak akan tercapai selama kemerdekaan Palestina belum didapatkan.

Jepang telah memberikan banyak bantuan kepada Palestina secara

finansial baik secara langsung dari pemerintah Jepang hingga bantuan yang disalurkan melalui sejumlah organisasi internasional. Jepang juga berupaya mendukung kemerdekaan Palestina dengan menginisiasi *Corridor for "Peace and Prosperity" Initiative* yang bertujuan agar Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan. Dengan seluruh upaya ini Jepang masih menciptakan inovasi baru dengan menginisiasi *Conference on Cooperation among East Asian Nation for Palestinian Development* atau CEAPAD yang sifatnya pemberian bantuan dalam bentuk capacity building. Hal ini pun menjadi sebuah pertanyaan karena mengingat kondisi dalam negeri Palestina yang masih menghadapi sejumlah tantangan besar dalam menjaga stabilitas politik dan keamanannya akibat konflik berkepanjangan dengan Israel.

Konflik Palestina dan Israel yang masih terus berlangsung, keterbatasan infrastruktur, serta ketergantungan pada bantuan internasional membuat hasil dari capacity building yang merupakan tujuan utama dari CEAPAD menjadi kurang optimal. Walaupun CEAPAD bertujuan untuk menyiapkan keterampilan sumber daya manusia Palestina ketika kemerdekaan Palestina sudah dapat dicapai, namun upaya capacity building ini tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya stabilitas domestik yang memadai di Palestina. Meskipun hambatan ini terlihat jelas, Jepang tetap mendukung CEAPAD sebagai bentuk komitmennya terhadap proses pembangunan damai dan mencoba memberikan pengaruh positif di kancah internasional. Hal ini menunjukkan bahwasannya inisiasi CEAPAD dibentuk bukan semata-mata untuk kebutuhan Palestina, melainkan terdapat upaya Jepang untuk menjalankan perannya sebagai pemimpin kawasan, mediator, dan donatur yang berkomitmen terhadap perdamaian dunia.

Meskipun CEAPAD diinisiasi dengan semangat untuk memperkuat pembangunan dan stabilitas di Palestina melalui capacity building dan kerja sama lintas negara Asia Timur, namun efektivitas dari forum ini tidak lepas dari sejumlah tantangan dan keterbatasan yang signifikan. Salah satu keterbatasan utama CEAPAD adalah kondisi domestik Palestina yang tidak

stabil, baik secara politik, keamanan, maupun sosial ekonomi. Konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel menyebabkan instabilitas yang kronis, serta menghambat implementasi berbagai program pembangunan yang dirancang dalam forum CEAPAD. Ketidadaan kedaulatan penuh Palestina atas wilayahnya sendiri, termasuk kontrol terbatas terhadap perbatasan, anggaran negara, hingga akses terhadap sumber daya, menyebabkan program-program peningkatan kapasitas yang digagas melalui CEAPAD menjadi sulit dijalankan secara efektif. Akibatnya, banyak hasil dari program tersebut yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, karena terhambat oleh sistem politik yang rapuh serta infrastruktur dasar yang belum memadai.

Selain itu, jalur distribusi bantuan internasional ke Palestina, termasuk bantuan dari CEAPAD, sangat bergantung pada izin dan kontrol dari pihak Israel. Israel melakukan pembatasan ketat terhadap lalu lintas barang dan manusia, terutama di Jalur Gaza, melalui titik masuk Rafah dari Mesir maupun Allenby Bridge dari Yordania. Blokade yang diberlakukan oleh Israel menyebabkan banyak bantuan terhenti di perbatasan atau bahkan tidak pernah sampai ke masyarakat yang membutuhkan (Guritno, 2025). Bahkan, tidak jarang barang bantuan yang telah disiapkan harus dijual kembali karena kedaluwarsa atau tidak dapat masuk ke wilayah Gaza selama berbulan-bulan. Hal ini menunjukkan bahwa forum seperti CEAPAD, yang berfokus pada *capacity building* dan pengembangan jangka panjang, sangat rentan terhadap dinamika politik dan militer di lapangan yang berada di luar kendali negara-negara Asia Timur.

Keterbatasan lainnya terletak pada pendekatan CEAPAD yang dan menghindari isu-isu politik substantif seperti pengakuan kedaulatan Palestina atau tekanan terhadap ekspansi permukiman Israel yang terus berlangsung. Meski CEAPAD mengusung dukungan terhadap solusi dua negara (*two-state solution*), tidak ada langkah konkret dalam konferensi CEAPAD yang secara langsung menargetkan aspek politik konflik tersebut. Fokus utama CEAPAD berada pada peningkatan kapasitas kelembagaan,

pendidikan, pertanian, dan infrastruktur ringa, Sementara kebutuhan mendasar rakyat Palestina juga mencakup kebebasan politik, pengakuan wilayah, dan pengentasan dari pendudukan. Masyarakat Palestina justru menginginkan dukungan yang mampu mendorong kemerdekaan secara politik, bukan hanya peningkatan kapasitas teknis yang tidak dapat dimanfaatkan selama wilayah mereka masih terjajah (Guritno, 2025). Oleh karena itu, selama Jepang dan negara-negara anggota CEAPAD enggan menyentuh isu-isu politik utama dalam konflik Palestina–Israel, maka dampak forum ini akan tetap terbatas.

Maka dari itu, pendorong utama Jepang membentuk CEAPAD bukan hanya didasari oleh kepedulian terhadap kondisi kemanusiaan di Palestina, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan strategis Jepang dalam memperkuat posisinya di kawasan Asia Timur dan di panggung internasional secara lebih luas. Jepang melihat inisiatif ini sebagai peluang untuk menegaskan eksistensinya sebagai aktor global yang bertanggung jawab, serta memperluas pengaruh diplomatiknya melalui jalur multilateralisme dan pembangunan damai. Inisiatif CEAPAD menjadi salah satu bentuk konkret dari doktrin “Proactive Contribution to Peace” yang dikedepankan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe selama masa kepemimpinannya. Doktrin ini menandai transformasi penting dalam politik luar negeri Jepang, dari yang sebelumnya pasif dan berfokus pada aspek ekonomi, menjadi lebih proaktif dalam isu-isu global, terutama yang berkaitan dengan perdamaian dan stabilitas kawasan. Dalam kerangka ini, Jepang berusaha untuk meningkatkan kontribusinya dalam menciptakan tata dunia yang damai melalui peran non-militer, seperti diplomasi pembangunan dan mediasi konflik.

Lebih lanjut, Jepang juga menghadapi tekanan geopolitik yang semakin besar di kawasan Asia Timur, terutama akibat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan politik baru. Pengaruh Tiongkok yang terus meluas di Asia Tenggara melalui berbagai inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) telah

menggeser keseimbangan kekuatan regional dan menimbulkan kekhawatiran bagi Jepang. Dalam konteks ini, CEAPAD dibentuk tidak hanya sebagai forum bantuan untuk Palestina, tetapi juga sebagai instrumen diplomatik untuk menjaga relevansi Jepang di Asia Timur dan mempertahankan statusnya sebagai pemimpin regional. Dengan membentuk forum yang menghimpun negara-negara Asia Timur, termasuk negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura—tanpa mengikutsertakan Tiongkok pada CEAPAD I tahun 2013—Jepang secara simbolis menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kapasitas untuk menginisiasi dan memimpin forum regional tanpa dominasi Tiongkok (Schulze, 2019). Dalam hal ini, eksklusi Tiongkok bukan sekadar keputusan teknis, tetapi mencerminkan strategi Jepang untuk menciptakan ruang diplomatik alternatif bagi negara-negara Asia yang tidak selalu ingin berada di bawah bayang-bayang Tiongkok.

Langkah Jepang ini juga dapat dilihat sebagai bagian dari upaya memperkuat solidaritas regional berbasis nilai-nilai pembangunan damai dan stabilitas, sekaligus menciptakan blok solidaritas Asia Timur yang sejalan dengan prinsip-prinsip Jepang. Seperti yang dijelaskan oleh Ryantori (2015), ketidakhadiran Tiongkok dalam CEAPAD I mengindikasikan bahwa Jepang ingin menjadikan forum ini sebagai kanal diplomasi eksklusif yang mencerminkan nilai-nilai Jepang—yaitu bantuan pembangunan berbasis soft power, netralitas, dan dukungan terhadap tatanan dunia berbasis hukum internasional. Dalam konteks inilah CEAPAD juga menjadi wahana untuk membentuk kembali identitas Jepang sebagai mediator netral, terutama dalam isu-isu sensitif seperti konflik Palestina–Israel.

Di luar aspek regional, Jepang juga ingin mengukuhkan citranya sebagai negara yang memiliki tanggung jawab global. Sebagai salah satu negara maju dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia, Jepang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi pada perdamaian dan pembangunan di kawasan-kawasan konflik, termasuk di Timur Tengah. Namun, kontribusi ini tidak dilakukan melalui kekuatan militer atau campur

tangan politik secara langsung, melainkan melalui jalur bantuan pembangunan, diplomasi multilateral, dan penguatan institusi lokal. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari berbagai pejabat Jepang yang menyebutkan bahwa Jepang ingin memainkan peran “unik” dalam konflik Palestina-Israel—yaitu sebagai pihak luar yang netral, tidak memiliki sejarah kolonial atau kepentingan militer di wilayah tersebut, namun memiliki komitmen kuat terhadap stabilitas dan pembangunan (Toshiya, 2024). Dengan posisi ini, Jepang berharap dapat diterima oleh semua pihak sebagai fasilitator damai yang kredibel, baik oleh Palestina maupun oleh komunitas internasional.

Pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik yang berkaitan, penulis menemukan celah untuk melakukan pengembangan penelitian. Dengan adanya celah sebagai gap penelitian maka penelitian dapat memiliki sifat orisinalitas, di mana penelitian merupakan hasil perkembangan dan pengisi celah dari penelitian terdahulu yang pernah ada. Pertama, Hoshiro (2022) menemukan bahwa selama 30 tahun terakhir setelah piagam ODA terbentuk, alokasi ODA dilakukan dengan didorong oleh kepentingan dari Jepang dan telah menyimpang dari norma-norma internasional demi kepentingan Jepang untuk memberikan bantuan asing. Penelitian Hoshiro berpendapat bahwa piagam ODA telah mengubah perilaku alokasi bantuan Jepang sehubungan dengan sejumlah masalah mulai dari isu militer hingga isu non-militer. Menurut Khoiriati (2021), ODA Jepang mengalami transformasi dalam hal tujuan yang ingin dicapai dalam memberikan ODA kepada negara yang ditargetkan sebagai kebijakan luar negeri Jepang. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi transformasi tersebut, yaitu kepentingan domestik dan internasional Jepang, perubahan kondisi dari negara penerima, dan interaksi Jepang dengan negara penerima. Penelitian Hoshiro dan Khoiriati menjelaskan mengenai perubahan objektivitas ODA dengan melihat perilaku Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri secara umum melalui ODA, sedangkan penelitian ini akan menggunakan studi kasus kerangka kerjasama CEAPAD dalam menjelaskan peran bantuan luar negeri Jepang ke Palestina.

Bhatt (2016) mendeskripsikan sejumlah upaya Jepang dalam memberikan kepada Palestina melalui beberapa cara, mulai dari pemberian bantuan langsung dari pemerintah Jepang untuk Palestina, melalui organisasi internasional seperti UNRWA dan Uni Eropa, hingga pembentukan inisiasi untuk Palestina, yaitu Corridor for "Peace and Prosperity" Initiative dan CEAPAD. Selain itu, penelitian Bhatt juga memberikan saran mengenai bantuan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Jepang kepada Palestina, seperti mendukung upaya reformasi Palestina untuk mencapai fiskal yang berkelanjutan dan meningkatkan pengelolaan keuangan publik dengan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui pertanian dan agroindustri di Tepi Barat serta menekankan pada peningkatan kualitas bagi anak-anak di Palestina yang terkena dampak konflik. Meskipun penelitian Bhatt menjelaskan sejumlah upaya Jepang dalam memberikan bantuan kepada Palestina, namun penjelasan tersebut hanya sebatas pendeskripsian dari data tanpa ada analisis lebih lanjut mengenai bantuan yang diberikan oleh Jepang. Sedangkan dalam penelitian ini, kerjasama bantuan yang diinisiasi oleh Jepang untuk Palestina, yaitu CEAPAD akan dianalisis menggunakan teori peran Holsti untuk menentukan peran Jepang dalam inisiasi tersebut.

Toshiya (2024) memaparkan bahwa Jepang dalam memberikan bantuan ke Palestina dipengaruhi kuat oleh kekuatan Amerika Serikat untuk mendorong upaya jangka panjang Jepang dalam mendukung solusi *Two-State Solution* dan Jepang juga sebagai salah satu negara dengan perekonomian terkuat di dunia termotivasi untuk memenuhi tanggung jawab global dalam mewujudkan perdamaian dunia. Penelitian Toshiya menganalisis latar belakang dari upaya Jepang di Palestina ini dengan menggunakan studi kasus JICA di Palestina. Sedangkan pada penelitian ini, analisis peran Jepang dalam bantuan luar negeri Jepang ke Palestina akan dilakukan dengan menggunakan studi kasus kerangka kerjasama CEAPAD yang diinisiasi oleh Jepang.

Ryantori (2014) menjelaskan bahwa apakah terdapat motif politik atau ekonomi yang dibawa oleh Jepang dalam menginisiasi CEAPAD.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam terdapat motif politik dari CEAPAD yaitu untuk membangun citra positif Jepang di mata negara-negara Asia Tenggara karena diundangnya sebagian besar negara dari kawasan tersebut dalam konferensi dan juga tidak dilibatkannya Tiongkok dalam CEAPAD I telah menunjukkan motif politik yang kental dalam CEAPAD oleh Jepang. Penelitian Ryantori dilakukan pada tahun 2014 ketika CEAPAD II dan III belum dilaksanakan. Sehingga keterlibatan Tiongkok di CEAPAD belum didiskusikan pada penelitian tersebut. Sedangkan hingga tahun 2019, Tiongkok aktif dalam mengikuti program CEAPAD. Selain itu, motif dari Jepang dalam CEAPAD merupakan instrumen utama dalam penelitian Ryantori, sehingga berbeda dengan penelitian ini yang akan menganalisis Jepang dalam CEAPAD dengan menggunakan teori peran negara dari Holsti.

Schulze (2018) melalui pendekatan persaingan strategis menjelaskan bahwa motif Jepang dalam CEAPAD didorong oleh kompetisinya dengan Tiongkok. Jepang yang ingin diakui sebagai kekuatan global oleh dunia melihat perlu mengambil bagian aktif dalam suatu konflik global, dengan kebangkitan Tiongkok tentu membuat Jepang berupaya meningkatkan statusnya di arena global. Selain itu, dengan melihat ambisi Tiongkok, posisi Jepang dipandang terancam oleh meningkatnya pengaruh ekonomi dan politik Tiongkok. Hal ini diperkuat dengan kebijakan luar negeri Jepang menilai Tiongkok sebagai pesaing kepentingan dan agenda dari kebijakan luar negeri Jepang. Penelitian Schulze menjelaskan kepentingan Jepang dalam CEAPAD dengan melihat kompetisinya dengan Tiongkok serta dibatasi pada periode 2013 dan mengabaikan periode CEAPAD setelah Tiongkok bergabung dengan CEAPAD di tahun 2016, sedangkan penelitian ini menjelaskan peran Jepang melalui CEAPAD periode kepemimpinan Shinzo Abe tahun 2012-2020 dengan menggunakan teori peran negara Holsti dan penelitian ini juga tidak terbatas dengan kompetisi Jepang dengan Tiongkok. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa Jepang menggunakan bantuan luar negeri sebagai salah satu instrumen utama dalam kebijakan luar

negerinya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Meski demikian, penulis melihat celah untuk menganalisis peran Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri kepada Palestina dengan menginisiasi CEAPAD periode kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe. Di mana pada penelitian terdahulu belum ada penelitian yang secara spesifik meneliti mengenai peran Jepang dalam CEAPAD periode kepemimpinan Shinzo Abe. Periode kepemimpinan Shinzo Abe menjadi penting karena pada tahun 2013 yaitu pada masa Shinzo Abe memimpin menjadi tahun CEAPAD pertama kali diselenggarakan. Lalu di tahun-tahun setelahnya CEAPAD kembali diselenggarakan yaitu pada tahun 2014 dan 2018, sedangkan pada tahun 2016 dan 2019 juga diselenggarakan CEAPAD Senior Meeting. Periode kepemimpinan Shinzo Abe menjadi relevan karena mencakup awal peluncuran CEAPAD serta pemerintahan Abe juga memperkenalkan konsep “*Proactive Contribution to Peace*” yang dapat menjadi latar belakang Jepang dalam menginisiasi kerangka kerjasama ini. Dengan demikian, selama periode kepemimpinan Shinzo Abe terdapat sejumlah upaya Jepang dalam memberikan bantuan kepada Palestina melalui CEAPAD dapat membantu proses analisis mengenai peran Jepang untuk Palestina melalui CEAPAD.

Peran Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri ke Palestina dengan menginisiasi CEAPAD akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini dengan berlandaskan teori peran dari Holsti. Teori peran Holsti akan membantu penelitian ini untuk menganalisis bagaimana Jepang memandang dirinya dalam sistem regional hingga internasional serta bagaimana pandangan tersebut dapat mengkonsepsikan peran apa yang ingin dijalankan. Dengan menggunakan teori peran Holsti dan periode kepemimpinan Shinzo Abe dalam penelitian ini, maka akan memberikan penjelasan mengenai apakah Jepang secara konsisten menjalankan peran yang sama atau mengalami perubahan sepanjang periode tersebut. Untuk memperkuat proses analisis, penelitian ini juga akan menggunakan konsep bantuan luar negeri dan konsep kerjasama multilateral.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan membahas peran Jepang dalam memberikan bantuan luar negeri ke Palestina melalui CEAPAD. Persepsi Jepang terhadap posisi dirinya di sistem regional hingga internasional menjadi penting untuk diteliti dalam melihat pembentukan inisiasi kerjasama bantuan ke Palestina melalui CEAPAD. Selain itu, dinamika yang terjadi pada periode kepemimpinan Shinzo Abe juga akan memainkan peran penting untuk melihat konsistensi peran Jepang dalam memberikan bantuan untuk Palestina. Maka dari itu, dalam melakukan penelitian ini untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka rumusan masalah yang akan digunakan, yaitu “Bagaimana peran Jepang dalam kerjasama bantuan ke Palestina melalui CEAPAD?”.

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan ruang lingkup agar fokus kajian lebih terarah dan mendalam. Batasan utama dalam penelitian ini terletak pada periode waktu yang dikaji, yakni hanya mencakup masa pemerintahan Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri Jepang, secara khusus dari tahun 2012 hingga 2020. Batasan ini ditetapkan karena periode tersebut menandai kembalinya Abe ke tampuk kekuasaan dan merupakan masa yang penuh dengan dinamika politik, kebijakan luar negeri, serta transformasi kebijakan domestik yang signifikan. Dengan membatasi rentang waktu penelitian, penulis dapat lebih fokus dalam menganalisis kebijakan-kebijakan yang relevan dan mengevaluasi dampaknya secara kontekstual dalam kerangka waktu yang jelas dan konsisten.

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari Jepang dalam kerjasama bantuan ke Palestina melalui CEAPAD pada periode kepemimpinan Shinzo Abe (2012-2020).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1.5.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai rujukan serta tambahan informasi dan referensi bagi pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, serta peneliti lain dalam memahami dinamika peran yang terjadi di balik bantuan luar negeri yang dapat berkontribusi pada arah kebijakan luar negeri dari suatu negara.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah menambahkan literatur mengenai bantuan luar negeri dan peran bantuan luar negeri terhadap suatu negara serta menambah wawasan mengenai digunakannya teori peran negara dalam menganalisis bantuan luar negeri.

1.6 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama mencakup penjelasan penulis mengenai latar belakang rumusan masalah yang telah dipilih oleh penulis, yaitu peran dari bantuan luar negeri Jepang ke Palestina melalui CEAPAD dengan menggunakan teori peran negara dari Holsti. Selain itu, pada bab ini penulis memberikan penjelasan dari penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini untuk mendukung bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan. Penulis juga menguraikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulis secara lebih mendalam.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua mencakup penjelasan penulis mengenai teori dan konsep yang digunakan untuk membantu menganalisis topik pembahasan penelitian. Teori dan konsep turut akan membantu penulis dalam membangun kerangka pemikiran yang dipakai dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga mencakup penulis mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan penulis, yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan

jadwal penelitian.

BAB VI DINAMIKA HUBUNGAN JEPANG DAN PALESTINA

Bab keempat mencakup penjelasan penulis mengenai dinamika hubungan yang terjadi antara Jepang dan Palestina. Penjelasan dinamika hubungan Jepang dan Palestina dimulai dari titik awal hubungan Jepang dan Palestina sampai masa kepemimpinan Shinzo Abe.

BAB V PERAN JEPANG DALAM KERJASAMA BANTUAN KE PALESTINA MELALUI CONFERENCE ON COOPERATION AMONG EAST ASIAN NATION FOR PALESTINIAN DEVELOPMENT (CEAPAD)

Bab kelima mencakup analisis penulis mengenai peran dari kerjasama Jepang ke Palestina melalui CEAPAD periode kepemimpinan Shinzo Abe, mulai dari tujuan Jepang dalam CEAPAD, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Jepang dalam memberikan bantuan ke Palestina, hingga hasil yang didapatkan oleh Jepang dan Palestina dari bantuan tersebut serta akan dianalisis dengan menggunakan teori peran Holsti.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima mencakup penjelasan penulis mengenai kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian penulis.